Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

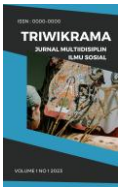

REVOLUSI MENTAL BERBASIS BUDAYA: MENGGALI NILAI ETIS DALAM TRADISI LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN BANGSA

Hafidza Aisyarifa Rahmalia Buchori, Rayhan Putra Narendra, Salwa Nur Fitria, Saskia Maharani, Abdul Fadhil

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available online Juli 2026

Email:
hafidza_1201625017@mhs.unj.ac.id,
rayhanputranarendra31@gmail.com,
salwa_1201625068@mhs.unj.ac.id,
saskia_1204625090@mhs.unj.ac.id,
abdul_fadhil@unj.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Revolusi mental merupakan agenda prioritas nasional yang bertujuan membentuk karakter bangsa Indonesia yang berintegritas, beretos kerja tinggi, dan bergotong-royong. Namun implementasinya kerap terjebak pada pendekatan formal-struktural yang mengabaikan kekayaan nilai etis dalam tradisi lokal Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) untuk mengeksplorasi relevansi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, siri na pacce, tepa salira, dan tri hita karana sebagai fondasi substantif bagi revolusi mental yang autentik dan berkelanjutan. Data diperoleh dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kritis-interpretatif menggunakan kerangka hermeneutik budaya dan teori modal sosial. Temuan menunjukkan bahwa tradisi lokal Nusantara mengandung sistem etika sosial yang kompleks, teruji, dan berpotensi besar sebagai instrumen pembangunan karakter bangsa. Integrasi nilai lokal dalam program revolusi mental tidak hanya memperkuat identitas kebangsaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat akar rumput secara lebih organik dan berkelanjutan. Strategi integrasi yang direkomendasikan mencakup pemetaan nilai lokal, reformasi kurikulum pendidikan, pemberdayaan lembaga adat, pengembangan konten budaya kreatif, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku.

Kata Kunci: revolusi mental, nilai etis, budaya lokal, pembangunan bangsa, karakter bangsa, kearifan lokal, modal sosial.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang tidak tertandingi di dunia. Dengan lebih dari 1.340 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan ribuan sistem adat yang hidup berdampingan, Indonesia menyimpan kekayaan nilai etis yang luar biasa kaya (Badan Pusat Statistik, 2010). Kekayaan ini sejatinya merupakan modal sosial yang tak ternilai bagi proses pembangunan nasional, termasuk dalam agenda transformasi karakter bangsa yang dikenal sebagai revolusi mental.

Konsep revolusi mental kembali mengemuka secara masif ketika Presiden Joko Widodo menjadikannya salah satu agenda utama pemerintahannya sejak 2014. Melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang menargetkan perubahan fundamental dalam

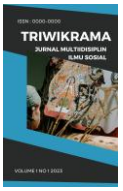

tiga nilai utama: integritas, etos kerja, dan gotong royong. Program ini diimplementasikan lintas kementerian dan lembaga dengan anggaran yang signifikan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2017).

Namun setelah lebih dari satu dekade implementasi, berbagai kajian menunjukkan bahwa GNRM belum mencapai hasil yang memuaskan. Evaluasi Bappenas (2020) menyimpulkan bahwa program ini belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dan terukur di tingkat masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih stagnan di angka 34 sampai 38 dari skala 100 selama periode 2014 hingga 2023 (Transparency International, 2023), serta berbagai indikator sosial lainnya, mengisyaratkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Salah satu kritik mendasar yang paling relevan adalah bahwa GNRM cenderung bersifat top-down dan mengabaikan sistem nilai yang sudah hidup dalam masyarakat. Koentjaraningrat (1985) dalam karyanya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan telah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa perubahan mentalitas tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh organik dari dalam sistem nilai yang sudah dianut masyarakat. Peringatan ini tampaknya belum benar-benar diinternalisasi dalam desain program revolusi mental yang ada.

Di sisi lain, tradisi lokal Nusantara sesungguhnya menyimpan khazanah nilai etis yang kaya, mendalam, dan telah teruji selama berabad-abad. Penelitian Putnam (1993) tentang peran modal sosial dalam pembangunan menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki jaringan kepercayaan dan norma sosial yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kolektif. Argumen ini memberi landasan teoretis yang kuat bagi pentingnya menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam program revolusi mental.

Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian nilai-nilai lokal. Survei BPS (2021) mengungkapkan adanya penurunan yang cukup signifikan dalam partisipasi generasi muda perkotaan pada kegiatan-kegiatan berbasis nilai komunal seperti gotong royong dan musyawarah adat. Kondisi ini memperkuat urgensi intervensi kebijakan yang sistematis untuk merevitalisasi nilai-nilai tersebut sebelum erosi berlangsung semakin jauh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Nilai-nilai etis apa saja yang terkandung dalam tradisi lokal Nusantara yang relevan bagi agenda revolusi mental?; (2) Sejauh mana nilai-nilai tersebut relevan bagi pembangunan bangsa Indonesia kontemporer?; dan (3) Strategi apa yang paling efektif untuk mengintegrasikan nilai lokal dalam program revolusi mental? Artikel ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut melalui kajian pustaka yang sistematis dan analisis kritis-interpretatif.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

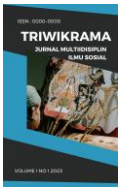

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Revolusi Mental: Konsep dan Sejarah

Istilah “revolusi mental” sebenarnya punya rekam jejak yang panjang dalam sejarah politik dan pemikiran di Indonesia. Bung Karno adalah tokoh pertama yang melontarkan ide ini di awal tahun 1960-an. Saat itu, ia melihat ada kebutuhan mendesak untuk merombak total cara berpikir masyarakat pasca-penjajahan (Latif, 2011). Bagi Soekarno, merdeka secara fisik lewat perang saja tidak cukup. Indonesia butuh revolusi mental untuk mengikis habis mentalitas warisan kolonial, seperti rasa minder (inferioritas), ketergantungan pada pihak asing, dan sikap pragmatis yang sempit.

Seiring berjalannya waktu, konsep ini terus bersalin rupa mengikuti arah angin politik dan pergantian rezim. Di zaman Orde Baru, maknanya digeser untuk mendukung agenda modernisasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Begitu masuk Era Reformasi, fokusnya berubah lagi menjadi jargon antikorupsi, penegakan demokrasi, dan penguatan hak-hak sipil. Baru pada era Jokowi, konsep yang tadinya abstrak ini coba dibumikan lewat tiga nilai praktis: integritas (jujur dan bertanggung jawab), etos kerja (disiplin dan inovatif), serta gotong royong (solidaritas demi kepentingan bersama) (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2017).

B. Teori Modal Sosial

Kerangka teori modal sosial menjadi salah satu landasan analitis yang paling relevan dalam memahami hubungan antara nilai budaya lokal dan pembangunan. Putnam (1993, 2000) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial beserta norma-norma kepercayaan dan resiprositas yang melekat di dalamnya. Ia membedakan antara bonding social capital, yaitu modal sosial yang mengikat kelompok internal, dan bridging social capital, yaitu modal sosial yang menjembatani kelompok yang berbeda.

Bourdieu (1986) mengembangkan konsep modal sosial dari perspektif yang lebih kritis, melihatnya sebagai sumber daya yang dapat diakumulasi dan dikonversi menjadi bentuk-bentuk modal lain seperti modal ekonomi, kultural, dan simbolik. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang telah terinstitusionalisasi dalam praktik budaya masyarakat Indonesia selama berabad-abad.

Coleman (1988) menambahkan dimensi struktural pada konsep modal sosial, menekankan pentingnya jaringan kepercayaan yang melampaui batas-batas kelompok primer. Ia menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia secara kolektif. Temuan ini relevan untuk memahami

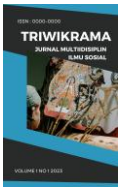

bagaimana nilai-nilai lokal yang pada mulanya bersifat komunal dapat ditransformasi menjadi modal sosial yang berdampak pada skala nasional.

Fukuyama (1995) memperluas diskusi tentang modal sosial dengan menekankan peran kepercayaan dalam mendorong kemakmuran ekonomi. Ia menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi cenderung memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, tingkat korupsi yang lebih rendah, dan kapasitas organisasi ekonomi yang lebih besar. Nilai-nilai lokal Nusantara yang menekankan kepercayaan dan solidaritas komunal dengan demikian dapat dilihat sebagai prasyarat kultural bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Hermeneutik Budaya sebagai Kerangka Analisis

Analisis nilai-nilai dalam tradisi lokal memerlukan pendekatan hermeneutik yang sensitif terhadap konteks. Geertz (1973) dalam karyanya The Interpretation of Cultures menegaskan bahwa kebudayaan adalah sistem simbol yang harus dipahami dari dalam, bukan sekadar dari perspektif pengamat luar. Ia mengembangkan metode deskripsi tebal (thick description) yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap makna di balik praktik budaya.

Ricoeur (1981) mengembangkan hermeneutik sebagai metodologi interpretasi teks dan tindakan budaya yang melampaui dikotomi penjelasan dan pemahaman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mendeskripsikan nilai budaya, tetapi juga mengungkap potensi transformatifnya dalam konteks kekinian. Bagi Ricoeur, teks dan tindakan budaya selalu memiliki surplus makna yang melampaui intensi pengarangnya, sehingga nilai-nilai lama dapat terus menemukan relevansi baru dalam konteks yang terus berubah.

Said (1978) melalui kritik orientalisme-nya mengingatkan tentang bahaya esensialisme budaya, yakni kecenderungan untuk mereduksi budaya non-Barat menjadi entitas yang statis, homogen, dan tidak berubah. Peringatan ini relevan dalam konteks kajian nilai lokal: setiap tradisi budaya adalah entitas yang hidup, dinamis, dan terus bernegosiasi dengan konteks zamannya. Pendekatan hermeneutik memungkinkan kita untuk menghargai nilai lokal tanpa terjebak dalam romantisasi yang ahistoris.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) atau studi literatur sistematis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat konseptual dan memerlukan sintesis dari berbagai sumber pengetahuan yang tersebar dalam literatur akademik, dokumen kebijakan, dan catatan etnografis (Zed, 2008).

Sumber data dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (Inpres No. 12/2016), dokumen kebijakan

pemerintah, dan laporan resmi lembaga negara. Kedua, sumber sekunder yang mencakup buku-buku akademik dari bidang antropologi, sosiologi, pendidikan, dan filsafat; artikel jurnal ilmiah dari pangkalan data Scopus, Google Scholar, dan SINTA; serta laporan penelitian dari lembaga-lembaga riset terpercaya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci: revolusi mental, nilai etis, kearifan lokal, modal sosial, pembangunan karakter, dan budaya Nusantara. Literatur yang ditemukan kemudian disaring berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran, dengan memprioritaskan terbitan antara tahun 1985 hingga 2023.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kedua, penyajian data dengan mengorganisasi temuan ke dalam tema-tema analitis yang koheren. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis berdasarkan kerangka teori modal sosial dan hermeneutik budaya (Miles dan Huberman, 1994).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Etis dalam Tradisi Lokal Nusantara

Kajian terhadap berbagai literatur etnografis dan antropologis mengidentifikasi setidaknya lima klaster nilai etis utama yang tersebar dalam tradisi lokal Nusantara dan memiliki relevansi tinggi bagi agenda revolusi mental. Kajian ini berfokus kepada fondasi nilai moral dan aturan perilaku tidak tertulis yang menjaga harmoni antar manusia dan sesama lingkungan. Kajian jurnal ilmiah menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sistem hukum adat, norma kesopanan, dan pedoman pembentukan karakter bangsa.

Tolok ukur moralitas yang bersumber dari hati nurani dan kesepakatan komunal untuk mengarahkan manusia pada kebajikan. Selain itu, pada nilai pada nilai kebudayaan kebiasaan adat istiadat suatu golongan menjadi ekspresi budaya yang tumbuh berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Oleh karena itu, terdapat nilai-nilai sosial dan budaya yang perlu dilestarikan sebagai bentuk kesadaran manusia dalam berkehidupan sosial sebagai berikut.

1) Gotong Royong dan Semangat Kolektivisme

Gotong royong merupakan nilai kolektivisme yang paling universal di seluruh Nusantara, meskipun dikenal dengan nama yang berbeda-beda: gugur gunung di Jawa, mapalus di Minahasa, subak di Bali, dan masohi di Maluku. Inti dari nilai ini adalah kerja bersama secara sukarela demi kepentingan bersama, tanpa orientasi pada keuntungan individual (Koentjaraningrat, 1985). Lebih dari sekadar praktik kerja bersama, gotong royong adalah ekspresi dari pandangan dunia yang menempatkan hubungan dan solidaritas komunal sebagai pondasi kehidupan sosial yang bermartabat.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

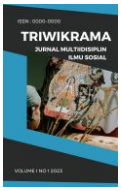

Dalam konteks revolusi mental, gotong royong memiliki relevansi langsung sebagai antidot terhadap mentalitas individualistik dan koruptif. Ketika seseorang menginternalisasi nilai gotong royong, ia memiliki orientasi moral yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, suatu sikap yang secara langsung bertentangan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Tilaar, 1999). Lebih jauh, gotong royong mengandung dimensi kepercayaan sosial yang oleh Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) diidentifikasi sebagai prasyarat esensial bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian Antlov et al. (2016) tentang implementasi UU Desa menunjukkan bahwa semangat gotong royong yang terlembagakan dalam mekanisme partisipasi desa berkontribusi signifikan pada keberhasilan program-program pembangunan berbasis komunitas. Temuan ini membuktikan bahwa nilai gotong royong bukan sekadar warisan budaya yang romantis, melainkan sumber daya sosial yang fungsional dan dapat dioperasionalkan dalam konteks pembangunan modern.

2) Musyawarah Mufakat sebagai Etika Demokrasi

Musyawarah mufakat adalah mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang mengutamakan konsensus di atas pemungutan suara mayoritas. Nilai ini paling kuat berakar dalam tradisi Minangkabau dengan sistem nagari dan kerapatan adat-nya, tetapi juga ditemukan dalam berbagai bentuk di hampir seluruh budaya Nusantara (Navis, 1984). Dalam tradisi Jawa dikenal sebagai rembug desa, dalam tradisi Batak sebagai runggu, dan dalam berbagai komunitas adat lainnya dengan nama dan mekanisme yang sedikit berbeda namun berprinsip sama.

Dari perspektif etika demokrasi deliberatif (Habermas, 1996), musyawarah mufakat mengandung nilai-nilai yang sangat relevan bagi pembangunan demokrasi substantif: penghormatan terhadap perbedaan pendapat, kemampuan argumentasi rasional, kemauan untuk berkompromi demi kepentingan bersama, dan tanggung jawab kolektif atas keputusan yang diambil. Nilai-nilai ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan budaya demokrasi yang lebih substantif dibanding demokrasi prosedural yang semata-mata berorientasi pada pemilihan.

Pentingnya nilai ini juga diakui oleh Latif (2011) yang berargumen bahwa demokrasi Indonesia tidak seharusnya mengekor secara membabi buta pada model liberal Barat, melainkan perlu menemukan model demokratisnya sendiri yang berakar pada tradisi musyawarah dan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks revolusi mental, menghidupkan kembali tradisi musyawarah berarti membangun warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

3) Siri na Pacce dalam Tradisi Bugis-Makassar

Siri na pacce adalah sistem nilai inti masyarakat Bugis-Makassar yang mengatur hubungan sosial berdasarkan rasa harga diri dan solidaritas. Siri secara harfiah berarti malu, namun dalam konteks etis ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri yang

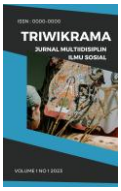

mendorong seseorang untuk bertindak terhormat dan menjaga martabat diri serta keluarganya (Mattulada, 1985). Dalam sistem nilai ini, menjaga kehormatan bukan tentang pencitraan sosial, melainkan tentang konsistensi antara nilai yang dianut dan tindakan yang dilakukan.

Pacce di sisi lain adalah rasa empati kolektif yang mendalam, yaitu kemampuan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan diri sendiri. Kombinasi siri dan pacce menciptakan etika sosial yang seimbang antara harga diri individual dan solidaritas komunal. Dalam konteks revolusi mental, nilai ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan budaya pelayanan publik yang berorientasi pada empati dan integritas, dua elemen yang selama ini paling sering disebut sebagai kelemahan birokrasi Indonesia.

Goleman (1995) dalam penelitiannya tentang kecerdasan emosional menunjukkan bahwa kemampuan berempati berkorelasi positif dengan kinerja kepemimpinan, kerjasama tim, dan kejujuran. Temuan ini secara tidak langsung memvalidasi relevansi nilai pacce sebagai kompetensi sosial-emosional yang esensial bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

4) Tri Hita Karana: Keseimbangan Kosmos Bali

Tri hita karana adalah filosofi dasar masyarakat Bali yang mengajarkan keseimbangan tiga hubungan fundamental: parahyangan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan sebagai hubungan manusia dengan sesama, dan palemahan sebagai hubungan manusia dengan alam. Filosofi ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan terwujud dalam berbagai institusi sosial, arsitektur, pertanian, dan seni budaya Bali (Pitana dan Gayatri, 2005).

Pengakuan UNESCO pada 2012 terhadap sistem subak sebagai manifestasi tri hita karana membuktikan bahwa nilai lokal ini memiliki kualitas yang diakui secara global. Lansing (1991) dalam studinya yang komprehensif tentang sistem irigasi subak menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan air berbasis komunitas yang diorganisir berdasarkan prinsip tri hita karana menghasilkan produktivitas pertanian yang lebih tinggi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem sawah Bali secara berkelanjutan. Ini adalah bukti empiris bahwa kearifan ekologis dalam tradisi lokal bukan hanya relevan, tetapi dalam konteks tertentu lebih efektif dari pendekatan manajemen modern.

Dalam konteks pembangunan bangsa, tri hita karana menawarkan model pembangunan yang secara inheren bersifat holistik dan berkelanjutan, sebuah alternatif terhadap paradigma pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Relevansinya semakin besar di tengah krisis ekologi global yang memerlukan perubahan paradigmatik dalam cara manusia memandang hubungannya dengan alam.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

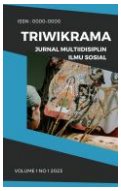

5) Tepa Salira dan Etika Empati dalam Tradisi Jawa

Tepa salira adalah konsep Jawa yang secara harfiah berarti mengukur dengan diri sendiri, sebuah kemampuan metakognitif untuk berempati dengan cara menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum bertindak. Konsep ini berkaitan erat dengan nilai-nilai lain dalam etika Jawa seperti andhap asor yang berarti rendah hati, ngajeni yang berarti menghormati, dan memayu hayuning bawana yang berarti memperindah dunia (Magnis-Suseno, 1984).

Dalam konteks pembangunan karakter, tepa salira dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kompetensi sosial-emosional yang kini semakin diakui sebagai faktor kritis dalam keberhasilan individual dan kolektif. Penelitian Berkowitz dan Bier (2005) tentang program pendidikan karakter menemukan bahwa pengembangan empati merupakan salah satu komponen paling efektif dalam membentuk perilaku prososial yang konsisten pada anak-anak dan remaja.

Magnis-Suseno (1984) menganalisis etika Jawa secara mendalam dan menunjukkan bahwa sistem nilai Jawa mengandung keseimbangan yang canggih antara dimensi vertikal berupa penghormatan terhadap yang lebih tua dan berwenang serta dimensi horizontal berupa solidaritas dan empati terhadap sesama. Memahami keseimbangan ini penting agar integrasi nilai tepa salira dalam program revolusi mental tidak menghilangkan dimensi kritis dan emansipatorisnya.

B. Relevansi Nilai Lokal bagi Pembangunan Bangsa

Analisis terhadap berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tersebut memiliki relevansi yang dapat diverifikasi dalam konteks pembangunan kontemporer, setidaknya dalam empat dimensi utama yang saling berkaitan.

Pertama, dalam dimensi tata kelola pemerintahan, penelitian Antlov et al. (2016) tentang implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di sejumlah provinsi menemukan bahwa desa-desa yang mempertahankan praktik musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan desa cenderung memiliki tingkat partisipasi warga yang lebih tinggi, akuntabilitas penggunaan dana desa yang lebih baik, dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai musyawarah bukan sekadar ritual adat, melainkan mekanisme tata kelola yang efektif dan dapat diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern.

Kedua, dalam dimensi ekonomi kerakyatan, berbagai penelitian tentang koperasi dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penentu keberhasilan lembaga-lembaga tersebut (Fukuyama, 1995). Sistem arisan, lumbung desa, dan berbagai bentuk ekonomi kolektif tradisional membuktikan bahwa nilai gotong royong dapat menjadi fondasi sistem ekonomi yang fungsional dan inklusif. Coleman (1988) secara khusus menunjukkan bahwa jaringan kepercayaan yang dibangun melalui norma-norma sosial berperan krusial dalam mendorong investasi pada sumber daya manusia di tingkat komunitas.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

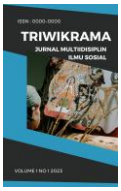

Ketiga, dalam dimensi ekologi dan keberlanjutan lingkungan, penelitian Lansing (1991) tentang sistem subak Bali memberikan bukti empiris yang kuat bahwa kearifan ekologis dalam tradisi lokal mampu menghasilkan solusi pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif secara ekologis sekaligus lebih berkeadilan secara sosial dibanding pendekatan teknokratis. Pengakuan UNESCO pada 2012 semakin memperkuat validitas klaim ini di tingkat internasional.

Keempat, dalam dimensi pendidikan karakter, meta-analisis Berkowitz dan Bier (2005) terhadap 33 program pendidikan karakter di Amerika Serikat menemukan bahwa program yang paling efektif adalah yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam budaya sekolah secara organik, bukan yang hanya mengajarkannya sebagai mata pelajaran terpisah. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa nilai lokal yang sudah terinternalisasi dalam budaya masyarakat memiliki potensi lebih besar sebagai instrumen pendidikan karakter dibanding nilai-nilai yang diperkenalkan dari luar.

C. Tantangan dan Peluang Integrasi

Meskipun potensinya besar, integrasi nilai lokal dalam program revolusi mental menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara serius dan strategis.

Tantangan pertama adalah heterogenitas budaya dan risiko esensialisme. Indonesia dengan lebih dari 1.300 suku bangsa memiliki sistem nilai yang sangat beragam, bahkan terkadang saling bertentangan satu sama lain. Upaya untuk mengangkat nilai-nilai tertentu sebagai 'nilai budaya nasional' berisiko jatuh ke dalam esensialisme, yakni penyederhanaan berlebihan yang mengabaikan kompleksitas dan dinamika internal setiap tradisi (Said, 1978). Mohanty (2003) menambahkan bahwa representasi budaya yang tidak kritis juga dapat meleggitimasi ketidaksetaraan yang ada dalam tradisi tersebut.

Tantangan kedua adalah praktik tradisi yang mengandung unsur diskriminatif. Tidak semua aspek dari tradisi lokal kompatibel dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Beberapa tradisi mengandung hierarki gender yang rigid, diskriminasi berdasarkan status sosial, dan eksklusivisme kelompok yang dapat menghambat inklusivitas sosial. Prinsip selective appropriation, yaitu mengambil inti nilai etis yang universal sambil meninggalkan praktik yang diskriminatif, harus menjadi panduan yang konsisten dalam proses integrasi.

Tantangan ketiga adalah erosi nilai akibat globalisasi dan digitalisasi. Penetrasi budaya global melalui media digital dan gaya hidup konsumeris telah mengikis internalisasi nilai-nilai lokal, khususnya di kalangan generasi muda perkotaan. Survei BPS (2021) menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah adat mengalami penurunan yang signifikan dibanding generasi sebelumnya. Kondisi ini menciptakan paradoks: di satu sisi nilai lokal diharapkan menjadi fondasi revolusi mental, di sisi lain basis internalisasinya terus menyusut.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

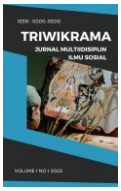

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang menjanjikan. Kebangkitan minat global terhadap indigenous knowledge dan local wisdom sebagai solusi alternatif bagi berbagai krisis global membuka ruang bagi revalorisasi nilai lokal Indonesia. Pengakuan UNESCO terhadap sistem subak Bali dan berbagai warisan budaya Indonesia lainnya memberikan legitimasi internasional yang dapat memperkuat posisi tawar nilai lokal dalam arena kebijakan nasional. Selain itu, perkembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya lokal menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya masih memiliki ketertarikan terhadap nilai-nilai lokal apabila dikemas dalam format yang relevan dan kontekstual.

D. Strategi Integrasi Nilai Lokal dalam Program Revolusi Mental

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini merumuskan lima strategi utama yang saling melengkapi untuk mengintegrasikan nilai lokal dalam program revolusi mental secara efektif dan berkelanjutan.

1. Pemetaan dan Dokumentasi Nilai Lokal secara Sistematis

Langkah fondasi yang harus dilakukan sebelum integrasi apapun adalah inventarisasi komprehensif nilai-nilai etis dari berbagai tradisi lokal. Pemerintah melalui Kemdikbudristek bersama BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga adat perlu menyusun basis data nilai etis lokal yang terstruktur, aksesibel, dan terus diperbarui. Basis data ini akan menjadi rujukan bersama bagi perancang kebijakan, pendidik, dan praktisi pembangunan karakter. Pengembangan basis data ini juga perlu memperhatikan dimensi konteks dan nuansa historis agar tidak terjebak dalam simplifikasi yang berpotensi distortif.

2. Reformasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Nilai Lokal

Nilai-nilai lokal perlu diintegrasikan secara bermakna ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, bukan hanya sebagai muatan lokal yang tersegregasi dan berdiri sendiri. Pendekatan yang dianjurkan adalah integratif-tematik, yaitu nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dan dioperasionalkan melalui project-based learning yang melibatkan praktik langsung dalam kehidupan sekolah dan komunitas (Tilaar, 1999). Berkowitz dan Bier (2005) menekankan bahwa pendidikan karakter paling efektif ketika nilai-nilai moral menjadi bagian dari iklim dan budaya institusi pendidikan, bukan sekadar konten kurikulum.

3. Pemberdayaan Lembaga Adat sebagai Mitra Strategis

Lembaga adat dan tokoh budaya adalah pemegang otoritas moral yang paling dipercaya di tingkat komunitas. Program revolusi mental perlu menempatkan mereka bukan sebagai ornamen seremonial, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki peran substantif dalam pembinaan karakter komunitas. Hal ini memerlukan rekognisi formal, dukungan kapasitas, dan mekanisme kolaborasi yang jelas antara lembaga

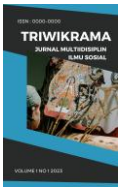

adat dan pemerintah. Antlov et al. (2016) menunjukkan bahwa pelibatan aktor-aktor lokal yang memiliki legitimasi kultural merupakan faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan yang berorientasi pada perubahan perilaku.

4. Pengembangan Ekosistem Konten Budaya Kreatif Digital

Untuk menjangkau generasi muda yang terhubung secara digital, nilai-nilai lokal perlu dikemas dalam format yang relevan dengan ekosistem budaya mereka. Pengembangan konten digital berkualitas tinggi, mencakup film pendek, podcast, web series, game edukatif, dan konten media sosial yang terinspirasi dari nilai lokal, dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Kolaborasi antara pemerintah, industri kreatif, dan komunitas lokal diperlukan untuk memastikan autentisitas sekaligus daya tarik konten tersebut bagi audiens yang dituju.

5. Evaluasi Berbasis Perubahan Perilaku dan Indikator Budaya

Program revolusi mental harus dievaluasi bukan berdasarkan jumlah kegiatan atau peserta, melainkan berdasarkan indikator perubahan perilaku yang terukur. Pengembangan instrumen evaluasi yang mengintegrasikan parameter budaya lokal seperti tingkat partisipasi dalam musyawarah, intensitas praktik gotong royong, dan indeks kepercayaan sosial perlu dilakukan secara ilmiah dan konsisten sebagai dasar perbaikan program. Miles dan Huberman (1994) menegaskan bahwa evaluasi kualitatif yang mendalam dan terus-menerus merupakan komponen tak terpisahkan dari penelitian dan program berbasis perubahan sosial.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Artikel ini telah menunjukkan bahwa revolusi mental yang autentik dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kekayaan nilai etis yang hidup dalam tradisi lokal Nusantara. Melalui kajian pustaka yang sistematis dengan kerangka teori modal sosial dan hermeneutik budaya, ditemukan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, siri na pacce, tri hita karana, dan tepa salira mengandung sistem etika sosial yang kompleks, teruji, dan relevan bagi konteks pembangunan bangsa Indonesia kontemporer.

Relevansi nilai-nilai tersebut tidak bersifat romantis-nostalgikal, melainkan dapat diverifikasi melalui bukti empiris dari berbagai penelitian terpercaya. Sistem subak Bali yang mendapat pengakuan UNESCO (2012), keberhasilan program desa berbasis musyawarah sebagaimana ditemukan Antlov et al. (2016), serta temuan Lansing (1991) tentang efektivitas pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, semuanya menunjukkan bahwa tradisi lokal memiliki potensi riil sebagai instrumen pembangunan yang efektif.

Namun integrasi nilai lokal dalam program revolusi mental harus dilakukan secara kritis dan selektif. Mengacu pada peringatan Said (1978) tentang bahaya esensialisme dan Mohanty (2003) tentang representasi budaya yang tidak kritis, pendekatan

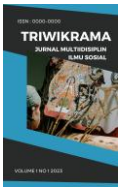

selective appropriation harus menjadi panduan yang konsisten. Heterogenitas budaya Indonesia harus dihormati sebagai kekayaan, bukan diratakan menjadi narasi tunggal yang berpotensi mengabaikan keragaman yang sesungguhnya.

Berdasarkan temuan dan analisis, artikel ini merekomendasikan lima strategi yang saling melengkapi: pemetaan sistematis nilai lokal, reformasi kurikulum pendidikan berbasis nilai lokal, pemberdayaan lembaga adat sebagai mitra strategis, pengembangan ekosistem konten budaya kreatif digital, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku yang terukur. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas adat, industri kreatif, dan masyarakat sipil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup kajian yang berfokus pada lima tradisi lokal utama dari keragaman yang jauh lebih besar di Indonesia. Penelitian lanjutan dengan metode etnografi mendalam dan penelitian tindakan partisipatif yang melibatkan komunitas lokal secara langsung sangat direkomendasikan untuk memperkuat dan memvalidasi temuan dalam artikel ini, khususnya dalam mengukur dampak nyata integrasi nilai lokal terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, revolusi mental berbasis budaya bukan tentang romantisasi masa lalu, melainkan tentang kebijaksanaan untuk belajar dari sistem nilai yang telah teruji selama berabad-abad dalam menavigasi tantangan kehidupan bersama. Indonesia yang maju dan bermartabat adalah Indonesia yang mampu menjadikan kekayaan budayanya sebagai kompas moral menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Antlov, H., Wetterberg, A., dan Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village

Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52*(2), 161--183. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1192539

Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik modal sosial Indonesia 2021*. BPS.

Bappenas. (2020). *Evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2015--2019*. Kementerian PPN/Bappenas.

Berkowitz, M. W. dan Bier, M. C. (2005). *What works in character education: A research-driven guide for educators*. Character Education Partnership.

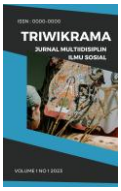

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241--258). Greenwood Press.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology, 94*(Suppl.), S95--S120.

Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures.* Basic Books.

Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ.* Bantam Books.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2017). *Pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental*. Kemenko PMK.

Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. PT Gramedia.

Lansing, J. S. (1991). *Priests and programmers: Technologies of power in the engineered landscape of Bali*. Princeton University Press.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT Gramedia.

Mattulada. (1985). *Latoa: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Gadjah Mada University Press.

Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (edisi ke-2). SAGE.

Mohanty, C. T. (2003). *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Duke University Press.

Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. PT Grafiti Press.

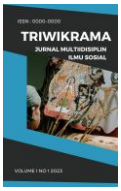

Pitana, I. G. dan Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Andi Offset.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences*. Cambridge University Press.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.

Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. PT Remaja Rosdakarya.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*. Transparency International.

UNESCO. (2012). *Bali Cultural Landscape of Subak as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*.

UNESCO World Heritage List.

Wibawa, S. (2017). Revolusi mental dalam perspektif filsafat pendidikan. *Jurnal Filsafat*, *27*(1), 10--34.

https://doi.org/10.22146/jf.22222

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications. (Rujukan untuk reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).